





Sementara itu, dalam GBHN : IV D 30 tahun 1973 - 1983 ditegaskan bahwa, setiap pemanfaatan tanah harus terkoordinasikan diantara berbagai jenis pembangunan, dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan usaha penataan kembali penggunaan dan penguasaan pemilikan tanah, termasuk pengalihan hak atas tanah. Untuk itu, pemerintah memandang perlu adanya program tata ruang dan tata guna tanah secara nasional.

Ditegaskan pula dalam pasal 10 ayat 1 UUPA, bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian, pada dasarnya wajib mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Satu masalah menarik tentang pelaksanaan landreform di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Propinsi Jawa Tengah untuk ditinjau dari segi hukum Islam. Karena Islampun mengajarkan tentang masalah landreform ini. Apakah kesamaannya antara hukum Islam dengan Hukum Nasional tentang masalah ini.

Dari hasil studi ini diharapkan akan dapat diperoleh manfaatnya bagi kita semua dan bagi umat Islam umumnya, dan bagi diri Penulis yang utama dalam kajian ilmiah lebih lanjut dalam masalah yang sama.













